

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 10
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 24 Januari 2022
Waktu : 10.20 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021;
2. *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Pertanian
TA. 2022; dan
3. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
didampingi oleh G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI/F-Gerindra), Rusdi Masse
Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-
NasDem), dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua
Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV
DPR RI)
Hadir : A. 45 Anggota dari 53 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Undangan:
1. Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.
(Menteri Pertanian);
2. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Sekretaris
Jenderal sekaligus Plt. Inspektur Jenderal
Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman
Pangan Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal
Hortikultura Kementerian Pertanian);
5. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian sekaligus Plt.
Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian
Pertanian);

6. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
7. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
8. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
9. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian);
10. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
11. Achmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*; beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Pertanian TA. 2022, dan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dibuka pukul 10.20 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Tahun 2021 serta rencana program, kegiatan, dan anggaran Tahun 2022. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi dan menyusun ulang rencana program, kegiatan, dan anggaran Tahun 2022 dengan lebih cermat dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan petani, yang akan dibahas lebih detail bersama dengan Eselon I pada rapat berikutnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas *Automatic Adjustment* Pagu Anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp680.488.248.000,00 (enam ratus delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar program dan kegiatan yang terkena *Automatic Adjustment* adalah kegiatan yang paling sedikit/tidak berdampak langsung terhadap upaya peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani serta mendukung penambahan anggaran Kementerian Pertanian untuk peningkatan ekspor dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional.

3. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan realokasi anggaran sesuai hasil RDP dengan Eselon I Kementerian Pertanian tanggal 15 November 2021, sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah) dari kegiatan *Food Estate* Kalimantan Tengah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk direalokasi eksternal ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk pengadaan *Combine Harvester* serta realokasi internal sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) yang dialokasikan untuk kegiatan Jaringan Irigasi Tersier, Jalan Usaha Tani, Alsintan (TR2, TR4, *Cultivator*, dan *Hand Sprayer*), dengan komposisi perubahan anggaran per Eselon I, sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.598.813.463.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, yang semula sebesar Rp2.188.179.655.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.208.179.655.000,00 (dua triliun dua ratus delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp985.515.027.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp1.177.410.034.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp1.605.218.582.000,00 (satu triliun enam ratus lima miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, yang semula sebesar Rp3.005.669.852.000,00 (tiga triliun lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar Rp2.985.669.852.000,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - h. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, sebesar Rp1.293.501.849.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp1.046.607.600.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
 - j. **Badan Ketahanan Pangan**, sebesar Rp445.996.136.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - k. **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp1.007.159.703.000,00 (satu triliun tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera merealisasikan kegiatan P2L, Bimbingan Teknis oleh Badan Ketahanan Pangan. Berkenaan dengan anggaran yang masih diblokir pada proses *Automatic Adjustment* Tahun 2022, agar segera diusulkan untuk dibuka blokir anggarannya kepada Kementerian Keuangan.
 5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk non subsidi untuk mengendalikan harga yang melonjak akibat kenaikan bahan baku dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk guna meningkatkan produktivitas lahan petani.
 6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar mekanisme pengumpulan data E-RDCK dilakukan setiap 4 tahun sekali dan setiap tahunnya dievaluasi dan diperbaharui serta diawasi secara komprehensif.
 7. Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pertanian untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan/atau persyaratan yang dinilai menghambat pelaksanaan kegiatan penyaluran aspirasi dalam rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan.
 8. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk segera melakukan tindak lanjut ketentuan penyelenggaraan karantina dalam satu badan sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
 9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyempurnakan regulasi, terkait perdagangan produk hortikultura dengan adanya penyesuaian atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mempertegas frasa rekomendasi (RIPH) dalam rangka perlindungan kepada petani dan jaminan keamanan produk hortikultura yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

10. Komisi IV DPR RI menerima usulan Kementerian Pertanian terkait perlunya relaksasi transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengantisipasi kondisi menghadapi perubahan iklim dan cuaca ekstrim serta dampaknya terhadap produksi pangan dan pertanian nasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

Menteri Pertanian,

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Ttd.

Dr. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.

Sudin, S.E.
A-151